

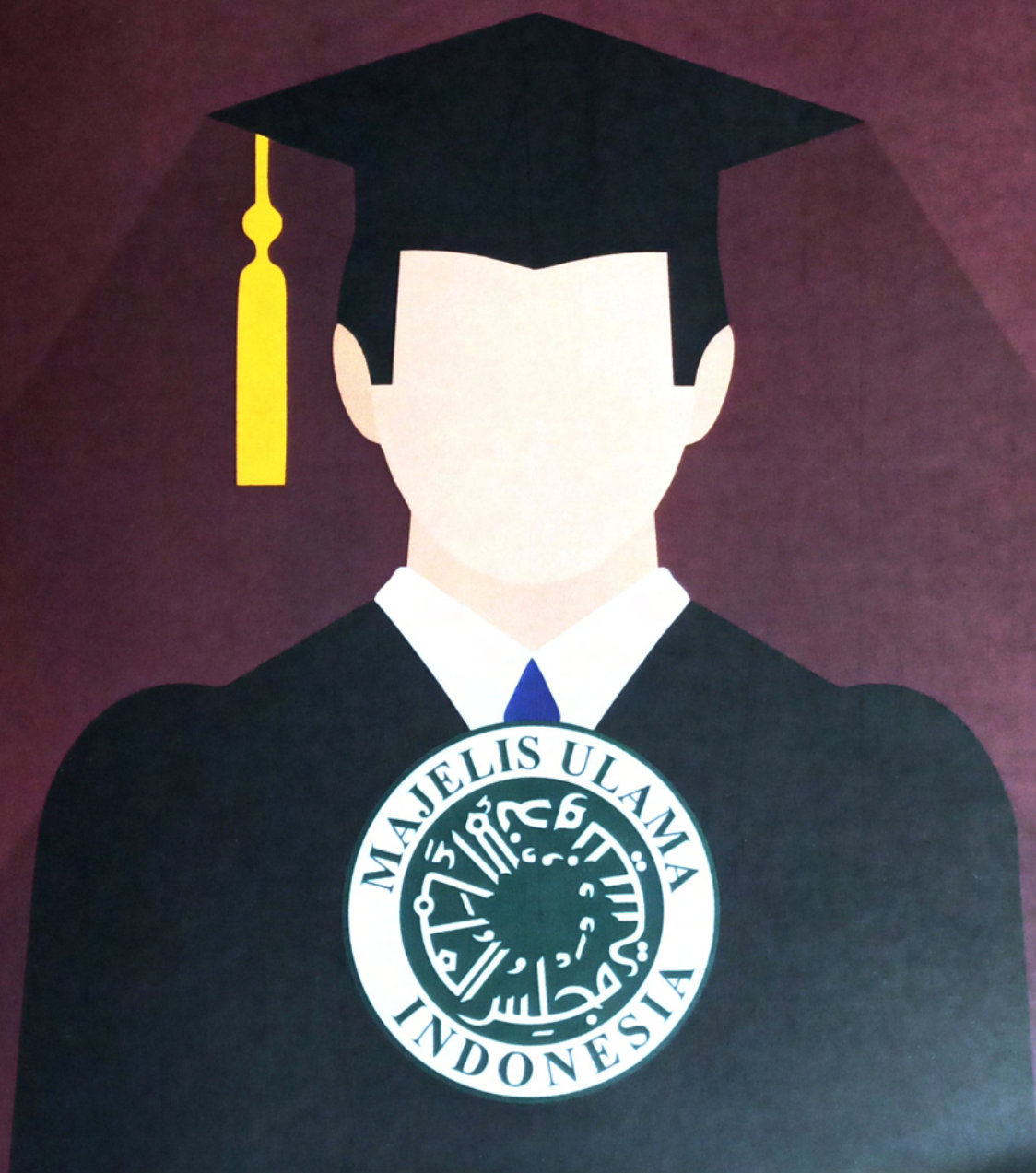
FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

DALAM PANDANGAN AKADEMISI



PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



**PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

**FATWA MUI
DALAM PANDANGAN AKADEMISI**

PENANGGUNG JAWAB
Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, MSi

Editor
Dr. Asrorun Ni'am Sholeh

PENERBIT
MAJELIS ULAMA INDONESIA

CETAKAN PERTAMA, JULI 2017

ISBN
978-979-19509-2-3

**PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

**FATWA MUI
DALAM PANDANGAN AKADEMISI**

PENANGGUNG JAWAB
Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, MSi

Editor
Dr. Asrorun Ni'am Sholeh

PENERBIT
MAJELIS ULAMA INDONESIA

CETAKAN PERTAMA, JULI 2017

ISBN
978-979-19509-2-3



**PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

FATWA MUI
DALAM PANDANGAN AKADEMISI

2017



PENGANTAR EDITOR

Alhamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan buku ini sehingga dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari *call for papers* untuk acara International Islamic Conference on MUI Studies, sebagai rangkaian kegiatan Milad MUI ke-42. Dalam rentang waktu empat puluh dua tahun dari kelahirannya, MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau demikian, khidmah tersebut belum seberapa dibanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat. Untuk itu perlu ada upaya sungguh-sungguh dan terus menerus untuk meningkatkan khidmah tersebut, baik pada aspek substansi (*madah*) maupun pada aspek metodologi (*kaifiyyah*) dan juga cara (*thariqah*).

Keberperanan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia telah banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior dan akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap MUI banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling sinis hingga yang paling moderat. Sudut pandang sorotan akan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut,

masing-masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kiprah MUI dari berbagai sudut pandang.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada kedekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, *pertama* kritik metodologi dan kelembagaan fatwa MUI, *kedua*, analisis konten fatwa MUI, termasuk analisis peran sosial budaya dan politik mui, dan *ketiga*, analisis peran fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah. Kami menyadari, bahwa kumpulan tulisan ini masih banyak kelemahan, terutama pada aspek penyelarannya, mengingat waktu penyiapan naskahnya begitu cepat. Walau demikian, atas terselesaikannya buku ini, tim editor perlu menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak orang, di antaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan amanah untuk mengurus kegiatan ini, Mas Zainut Tauhid Saadi yang telah memfasilitasi proses penerbitan buku ini; kepada para penulis yang telah bersedia untuk mengikuti acara *call for papers*.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman, khususnya yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2017

Editor

SERTIFIKASI HALAL MUI TERHADAP PRODUK SANDANG PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH* DAN MADHHAB NEGARA

Muh. Sholihuddin, M.HI

(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya)

ABSTRACT

This study is a library research entitled "MUI Halal Certification to Products of Clothing Perspective *Maqasid al-Shari'ah* dan the State Madhhab". Of the title can be formulated problem: 1) how the MUI halal certification to products of clothing?, dan 2) how the MUI halal certification to products of clothing perspective *maqasid al-shari'ah* dan the State Madhhab?. This study uses secondary data obtained from various readings example books, journals and other literary sources. Then, the data have been analyzed with content analysis. From the research that has been done can be concluded that Halal certification on products and clothing by MUI carried out in accordance with the procedures and standard mechanism who has been governed by Decree of Ijtima Ulama of Fatwa Commission from all Indonesian on Guidelines for Determination of Fatwa Majelis Ulama Indonesia years 2003 M. Then technically through the mechanism of action Fatwa Commission of Majelis Ulama Indonesia, as stated in the mechanism of action of Fatwa Commission MUI No. U634/MUI/X/1997. In perspective *maqasid al-shari'ah*, MUI carry kosher certification always pay attention *maqasid al-shari'ah*, is purposes of the objectives of syara', that maintenance on *daruriyyat al-khams* (religion, life, intellect, lineage and property). That is, every fatwa of MUI is expected to be able to realize the benefit of intent, like *ukhrawi* or *duniawi*. And in the perspective of the State Madhhab, halal certification by the MUI, indeed to protect consumers, especially consumers Muslims. Such security guarantees are the obliga-

tion of the state to its citizens. In this context the state has delegated such authority to the MUI. Therefore, Indonesian Muslims have to follow the fatwa decided by MUI.

Keyword: Halal Certification, *maqasid al-shari'ah*, State Madhhab.

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, publik dikejutkan dengan rencana pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk sandang atau non-makanan. Hal ini mulai mengemuka pada saat secara berantai muncul berita tentang “Sebuah jilbab merek ternama, ZOYA mengumumkan produk busanannya termasuk jilbab telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengumuman tersebut diungkapkan ZOYA pada laman instagram mereka dengan *tagline* “Kerudung Bersertifikat Halal Pertama di Indonesia”.¹

Rencana tersebut tentu membuat beberapa pihak, terutama pengusaha. Dengan memberlakukan sertifikasi halal untuk produk sandang atau non-makanan, seperti pakaian dan sepatu membuat khawatir pelaku usaha di daerah. Mereka menganggap kebijakan tersebut hanya akan mempersulit iklim usaha khususnya di bidang tekstil. Jika rencana tersebut direalisasikan, dia berharap persyaratan dan pengurusannya dipermudah. Jangan sampai jalannya ekonomi justru terganggu oleh perizinan.²

Berikaitan dengan hal tersebut pada saat dikonfirmasi tentang masalah pakaian bersertifikat halal, Kepala Bidang Informasi Halal LP-POM MUI Farid Mahmud mengemukakan bahwa belum ada kewajiban untuk setiap produsen memiliki sertifikat halal. Hingga saat ini permohonan tersebut masih dilakukan berdasarkan permintaan produsen terkait.³

Menurut Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin, bahwa semua produk sandang harus bersertifikasi halal, pasalnya ungkap dia ada bahan-bahan pakaian yang terbuat dari kulit babi. Keputusan MUI tersebut karena merujuk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

¹ <http://www.aktualita.co/ini-penjelasan-mui-soal-sertifikasi-halal-pada-jilbab/8434/>, diakses 19 Februari 2016.

² <http://ekbis.sindonews.com/read/1096148/34/sertifikasi-halal-produk-sandang-pengusaha-kecil-di-daerah-teriak-1459085508>, diakses 29 Maret 2016.

³ Ibid.

Jaminan Produk Halal (JPH), dan MUI berlandaskan kepada UU tersebut.⁴ Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI H Ikhsan Abdullah menambahkan, dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) diatur, karena pakaian dapat dikategorikan sebagai barang gunaan yang dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga mesti disertifikasi halal sebagaimana makanan, minuman, kosmetik, dan produk biologi/kimia.⁵ Sertifikasi halal terhadap pakaian menjadi sangat penting mengingat proses produksi pakaian melalui berbagai tahap yang sangat panjang dari bahan yang dipergunakan, pola, pemotongan, penjahitan, *steam* sampai pengepakan dan proses pengiriman.⁶

Saat ini, di Indonesia konsumen muslim sudah dilindungi dengan adanya labelisasi halal pada produk. Labelisasi tersebut didapat dari Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan menguji kehalalan dari suatu produk. Cara yang digunakan adalah dengan memberikan sertifikasi halal pada produk. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus uji dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam.

Namun, apa yang menjadi rencana pemerintah dan MUI tersebut tidak berarti *landing* karena beberapa pihak menganggap apa yang dilakukan oleh MUI tersebut sesuatu yang tidak penting dan mende-sak. Bahkan terkesan mengada-ngada. Seperti Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang mempersoalkan rencana MUI tersebut. Menurut Ketua PBNU, KH Imam Aziz kenapa hal semudah itu perlu disertifikasi?. Menurutnya, dalam hadits itu untuk laki-laki yang tidak boleh hanya pakaian berbahan sutera, hanya itu saja sementara yang lainnya boleh. Hal seperti ini sangat sederhana, tidak perlu dibuat repot.⁷ Apalagi jika sertifikasi halal tersebut menjadi monopoli MUI, maka tentu berpotensi terjadinya *moral hazard*.⁸

Dari paparan tersebut, maka ada beberapa hal yang patut menjadi

4 http://news.okezone.com/read/2016/03/25/337/1345524/mui-sepatu-dan-baju-harus-punya-sertifikasi-halal?utm_source=daihatu, diakses 29 Maret 2016.

5 <http://berita.suaramerdeka.com/mui-keluarkan-sertifikasi-halal-pakaian/>, diakses 29 Maret 2016.

6 Ibid.

7 <http://news.okezone.com/read/2016/03/26/337/1345994/pbnu-mui-tak-perlu-keluarkan-sertifikasi-halal-untuk-baju>, diakses 29 Maret 2016.

8 <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/20/mzpc59-nu-to-lak-monopoli-sertifikasi-halal>, diakses 29 Maret 2016.

catatan; *pertama*, sertifikasi halal pada produk sandang menjadi penting karena sangat dimungkinkan terdapat bahan baku yang berasal dari sesuatu yang terlarang secara *syar'i*. Walaupun beberapa pihak menganggap persoalan yang berkaitan dengan sandang sesungguhnya sangat sederhana dan tidak perlu dilakukan sertifikasi. Hal ini tentu beda dengan makanan dan obat-obatan. *Kedua*, jika kemudian sertifikasi halal ini betul-betul dilaksanakan harus tetap memperhatikan kelangsungan pengembangan bisnis yang berbasis pada produk sandang. Jangan sampai, sertifikasi halal ini justru membawa dampak bagi kerugian banyak orang (pengusaha dan karyawan). *Ketiga*, idealnya sertifikasi halal ini tidak lagi menjadi monopoli MUI tetapi juga bisa menjadi kewenangan lembaga atau organisasi yang memang mempunyai kompetensi untuk melakukan sertifikasi halal tersebut.

Dalam kajian hukum ekonomi Islam, memproteksi masyarakat terutama umat Islam dari sesuatu yang dilarang *shara'* merupakan hal yang sangat mendasar. Hal ini dilakukan agar masyarakat betul-betul terhindar dari perbuatan yang terlarang. Dan di sinilah, peran pemerintah dan MUI menjadi penting. Hanya saja, dalam melaksanakan sertifikasi halal tersebut jangan sampai merugikan pihak-pihak, sehingga kemasalahatan (*al-maslahah*) atau keadilan (*al-'adalah*) bisa terwujud sesuai dengan tujuan *shara'* (*maqasid al-shari'ah*).

Dalam Islam, keadilan adalah bagian penting dalam studi-studi hukum Islam, karena ia merupakan tujuan diberlakukannya syariat Islam (*maqasid al-shari'ah*). Munawir Sjadzali menyatakan, bahwa hukum Islam selalu bertalian dengan penegakan dan pemerataan keadilan, kebaikan serta kemaslahatan bagi masyarakat umum dengan tetap memperhatikan dunia dan tingkat peradaban sekarang ini.⁹ Menurut Masdar F. Mas'udi, keadilan merupakan suatu konsep yang sama dengan *al-maslahah*.¹⁰ Al-Shatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya *maslahat* hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.¹¹ Dari pandan-

9 Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 8.

10 Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI Tahun 1995, 97.

11 Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 4.

gan ini, kemudian berlaku kaidah “di mana ada kemaslahahan, di situ terdapat hukum Allah”. Hal ini, memang secara tegas ditunjukkan oleh al-Qur'an melalui perintah untuk berbuat adil dalam banyak ayatnya. Misalnya, Allah SWT. berfirman:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Dijelaskan dalam ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang yang adil (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan demikian, maka berbuat adil merupakan kewajiban sosial, politik, budaya, dan hukum, terutama bagi negara yang harus hadir dalam menegakkan keadilan bagi masyarakatnya.

Dalam konteks ini, menarik untuk melihat pendapat Ibrahim Hosen. Hosen mengemukakan :

(a) terwujudnya kemaslahahan umum sangat bergantung pada adanya *amar ma'ruf nahi munkar*, karena itu menegakkannya diperintahkan oleh agama. Pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar* menghendaki adanya pemimpin pemerintah, mengingat bahwa kelompok kecilpun diharuskan mengangkat pemimpin, sebagaimana ditegaskan hadits Nabi dalam riwayat Abu Daud dari Abu Said dan Abu Hurairah : “Jika ada tiga orang berada dalam perjalanan, hendaklah mereka mengangkat seorang diantaranya sebagai pemimpin”. Hadith ini melalui *dalalah al-nas* (*fahwal kh- itab, qiyas aulawi*) memerintahkan pula mengangkat pemimpin dalam suatu komunitas masyarakat. b) al-Qur'an ayat 59 surat al-Nisa' menegaskan : “Hai orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu”. Ayat ini dengan tegas memerintahkan orang Islam agar mentaati apa yang diperintahkan oleh ulil amr/pemerintah. Dan dengan pertimbangan demikian, ayat ini—juga melalui isyarat *nass*—memerintahkan adanya ulil amri/pemerintah. Oleh karena itu mengangkat pemimpin atau mendirikan negara adalah

12 Al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 8.

wajib. c).....berkenaan dengan persoalan kemasyarakatan, campur tangan pemerintah mutlak diperlukan, demi menghindari kesimpangsiuran dan ketidak pastian hukum. Di samping tentunya, agar terwujud keseragaman amaliah umat dan kemaslahahan umum. Karena itu, jika pemerintah memilih suatu hukum fiqh dan menetapkan, maka semua masyarakat terikat dengannya dan harus mematuhi. Sejalan dengan kaidah : "*Keputusan hakim (pemerintah, penguasa) mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat*". d) berdasarkan hukum aqli (rasio) adalah tepat dan sudah seharusnya menyerahkan urusan (persoalan kemasyarakatan) kepada seorang pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kezaliman dan mengatasi perselisihan dalam masyarakat. sebab, jika tidak demikian, tentu kekacauan akan melanda manusia.¹³

Di sinilah, peran negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen menjadi penting agar terjadi ketertiban di tengah masyarakat dan terjamin adanya ketertiban hukum karena akan ditaati oleh masyarakat. Dalam kajian *fiqh siyasah*, ini disebut madhhab negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sertifikasi halal MUI terhadap produk sandang?
2. Bagaimana sertifikasi halal MUI terhadap produk sandang perspektif *maqasid al-shari'ah* dan madhhab negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, dengan berdasarkan latar belakang di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan sertifikasi halal MUI terhadap produk sandang.
2. Untuk mengetahui sertifikasi halal MUI terhadap produk sandang perspektif *maqasid al-shari'ah* dan madhhab negara.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

¹³ Ibrahim Husain, 'Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik', *Jurnal Ilmu dan Kebeudayaan Ulumul Quran*. No. 2, Vol. IV, Tahun 1994, 61-62.

pustaka (*library research*). Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari berbagai bacaan, baik buku, jurnal maupun sumber-sumber kepustakaan lainnya.

Dalam dunia keilmuan ada upaya ilmiah yang disebut dengan metode, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji. Obyeklah yang menentukan metode, bukan sebaliknya.¹⁴

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data digunakan metode dokumentasi.¹⁵ Dengan metode ini, peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik melalui sumber primer maupun sekunder. Di antara sumber-sumber tersebut adalah :

- a. Abi Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*.
- b. Abi Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *al-I'tisam*.
- c. Najmuddin al-Tufi, *Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in*.
- d. Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*.
- e. Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*.

2. Metode Analisa Data

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara "*content analysis*". Cara ini digunakan untuk menganalisis data tertulis berupa isi komunikasi.¹⁶ Isi komunikasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep, pendapat, teori-teori, maupun prinsip-prinsip yang terdapat pada buku-buku, karya penelitian, atau tulisan lain yang pernah dimuat dalam berbagai media dan sebagainya. Di samping itu, juga digunakan analisa reflektif, dengan cara mengkonfirmasi temuan *content analysis* secara empirik, atau sebaliknya, sehingga makna temuannya semakin mendalam. Artinya analisis reflektif adalah pengujian secara

¹⁴ Mattulada, "Studi Islam Kontemporer : Sintesis Pendekatan Sejarah, Sosiologi, dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Cet. 3 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 4.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1995), 67.

¹⁶ Jalaluddin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), 122.

bolak-balik antara teoritik dan empirik atau antara deduksi dan induksi.

Kemudian langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, mengkaji persoalan konsep *maqasid al-shari'ah*. Dalam hal ini digunakan berbagai sumber karya tulis yang pernah ditulis oleh para ahli yang meneliti seluk-beluk *maqasid al-shari'ah*. Dari hasil data-data yang diperoleh ini, nantinya akan dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam rangka membandingkan untuk selanjutnya menganalisis ketentuan-ketentuan Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal, terutama yang berkaitan dengan produk sandang.

Adapun proses pembahasan dan analisis data tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu obyek, atau suatu sistem dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.¹⁷ Selanjutnya metode yang kedua adalah metode komparatif yang digunakan untuk membandingkan antara data-data yang ada, yang kemudian di analisis secara kritis, sehingga diharapkan bisa menghasilkan kesimpulan yang memadai.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sertifikasi Halal MUI Terhadap Produk Sandang Perspektif *Maqasid al-Shari'ah*

Kiprah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewadahi ulama dan organisasi Islam di Indonesia dengan latar belakang berbeda menjadikannya tidak mudah untuk menerapkan prinsip persatuan dan kesatuan umat Islam. Hal ini nampak pada keputusan-keputusan MUI yang tidak jarang menimbulkan pro-kontra serta kritik dari umat Islam sendiri. Namun, dengan pengalamannya yang sudah puluhan tahun menjadi modal yang luar biasa untuk membangun dan mendidik umat Islam. Apalagi, ulama-ulama yang masuk dalam MUI dikenal sebagai ulama-ulama yang dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni.

Terdapat dua faktor penting saat ini, di mana MUI menemukan tantangan di Indonesia, yaitu; *pertama*, faktor intern umat Islam. Kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia dalam hal pemahaman dan pengalaman agama yang relatif belum mendalam, bahkan bisa jadi ada

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia, 1998), 63.

umat Islam yang tidak pernah belajar.¹⁸ Hal ini tentu menjadi persoalan serius bagi Islam Indonesia yang terus bernah untuk kemajuan Indonesia. Seperti, karena pemahaman keagamaan yang kurang baik akan mudah digoyahkan oleh kondisi dan situasi yang ada. Kasus yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu Dimas Kanjeng Taat Pribadi dari Probolinggo yang diyakini oleh sebagian umat Islam dapat menggandakan uang. Secara nalar, kegiatan penggandaan uang tersebut tidaklah mungkin. Juga secara akidah ini bertentangan ajaran agama, karena agama mendidik pemeluknya untuk mencari uang dengan cara bekerja. Lebih daripada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecendrungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi sering juga menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri; *kedua*, faktor eksternal, yaitu suasana yang mengintari umat Islam dan bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan global yang sangat berat. Umat Islam Indonesia yang saat ini sedang menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) pasti akan menerima dampak dari itu. Pada era ini, bisa jadi produk-produk asing akan masuk ke Indonesia yang tentu tidak ada jaminan kehalalannya.¹⁹ Pastinya, standarisasi halal produk-produk luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Di sinilah peran MUI menjadi sangat penting untuk membentengi umat Islam agar produk-produk yang dipakai atau digunakan benar-benar sesuai secara syar'i.

MUI, sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa dalam membuat fatwa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum fatwa itu dikeluarkan. Secara umum, terdapat 2 (dua) tahap yang harus dilalui, yaitu kajian lapangan untuk dilakukan audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan kajian teori untuk merumuskan hukum terhadap persoalan yang membutuhkan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Fatwa MUI.

Selama ini, sebagaimana diakui oleh MUI, bahwa sertifikasi halal disetujui dan dikeluarkan baru sebatas permintaan dari produsen.²⁰ MUI belum secara aktif—umpamanya melakukan kunjungan

¹⁸ MUI Sumut, *Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)*, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, (Medan: MUI Sumut, 2006), 8.

¹⁹ Ibid., 9.

²⁰ <http://ekbis.sindonews.com/read/1096148/34/sertifikasi-halal-produk-sandang-pengusaha-kecil-di-daerah-teriak-1459085508>, diakses 29 Maret 2016.

ke lapangan—untuk menguji kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Padahal, dalam Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, MUI sebagai pemberi fatwa (*mufti*) dalam memberi fatwa diminta atau tidak diminta, mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat yang beragam aliran dan organisasi keagamaan.²¹ Ini artinya, pemberian fatwa MUI “tidak diminta” belum berjalan dengan efektif. Ke depan ini harus didorong agar bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari umat Islam untuk memberikan nasihat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam.

Secara metodologis untuk menjawab persoalan-persoalan yang membutuhkan fatwa, MUI menggunakan cara berjenjang yang dalam tradisi pemikiran hukum Islam sudah maklum. Cara yang digunakan tersebut dapat dirumuskan, sebagai berikut:²²

- a. Nass al-Qur'an
- b. Sunnah Nabi Saw.
- c. Ijma'
- d. Qiyas
- e. Istihsan
- f. Maslahah Mursalah
- g. Sakh al-Dhari'ah
- h. Pendapat Imam/ulama Madhhab

Jadi, MUI menggunakan dalil-dalil yang disepakati oleh ulama, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Juga menggunakan dalil-dalil yang tidak disepakati ulama, yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sakh al-dhari'ah*. Adapun pendapat ulama akan digunakan sebagai dalil adalah pendapat-pendapat ulama madhhab yang disepakati, jika kemudian imam madhhab ini tidak bersepakat atau berbeda pendapatnya, maka MUI akan melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat tersebut. Juga, yang patut dicatat adalah ketika ada masalah baru yang muncul kemudian membutuhkan fatwa, MUI akan membuka dan melihat apakah masalah-masalah baru tersebut dalam hal *'illat* sama dengan masalah-masalah yang sudah pernah dibahas sebelumnya oleh ulama

21 Keputusan Munas VII MUI Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/ Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.

22 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 4-5.

terdahulu. Cara seperti biasa disebut dengan *ilhhaqi*.²³ Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa MUI dalam metode fatwanya menggunakan tiga pendekatan, yaitu *nass qat'iy*, *qauli*, dan *manhaji*.²⁴

Dalam konteks *maqasid al-shari'ah* melaksanakan sertifikasi halal, MUI selalu memperhatikan *maqasid al-shari'ah*, yaitu maksud-maksud yang menjadi tujuan syara'. *Maqasid al-shari'ah* tersebut dikenal dengan *al-maslahah*, yakni selalu memperhatikan kemanfaatan dan menolak kemadaraman.²⁵ Dalam hal ini, Ibrahim Hosen, mantan Ketua Komisi Fatwa MUI 1981, menyatakan; pemeliharaan atas *daruriyyat al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sangat diperhatikan MUI tiap mengeluarkan fatwa. Artinya, tiap fatwa MUI diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan dimaksud, baik yang *ukhrawi* maupun *duniawi*. Akan tetapi, jika terjadi benturan antara maslahat non-*shar'iyyah* dengan *nass qat'iy* (teks yang sudah jelas), MUI tidak akan menggunakan maslahat, karena kemaslahatan hanya ditetapkan akal, sedang *nass qat'iy* oleh wahyu.²⁶

Pernyataan ini membawa kepada sebuah pemahaman, sebagai berikut;

- a. Dalam memberikan fatwa selalu mendasarkan diri kepada kemaslahatan

Kemaslahatan yaitu pemeliharaan terhadap *daruriyyat al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) baik *ukhrawi* atau *duniawi*. Hal ini karena tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahah hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. dengan maslahah, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaan hidupnya, tercapai

²³ Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007), Cet. Ke-I, 217-221.

²⁴ Ibid.

²⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: al-Amiriyah, 1412 H.), 250-251. Lihat juga Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: al-Amiriyah, 1412 H.), 250-251. Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa bi Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 275. Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al Maqasid 'inda Shatibi*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 1997), 205.

²⁶ Rumadi, "Metode *Istinbath* Muhammadiyah, NU dan MUI", [http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=285/hl=id/Metode Istinbath Muhammadiyah NU Dan MUI](http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=285/hl=id/Metode%20Istinbath%20Muhammadiyah%20NU%20Dan%20MUI), diakses 22 Agustus 2016.

apa yang dikehendaki oleh sifat *shahwati* dan *aqli*-nya secara mutlak, sehingga dia merasakan kenikmatan".²⁷ Juga, dengan kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk meraihnya Allah SWT. menuntut manusia untuk berbuat, sehingga mencapai kesempurnaan dan lebih mendekati kehendak syara'. Kalaupun dalam pelaksanaannya mengandung kerusakan sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh syara'.²⁸

Jadi, melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual.²⁹ Beda umpamanya, pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (*rigid*) sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya. Mengutip pendapatnya Satria Effendi, hukum Islam itu harus bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.³⁰

- c. Kemaslahatan dianggap sebagai sesuatu yang non-*shar'iyyah* karena ditetapkan berdasarkan akal

Hal ini tentu membingungkan dan bertentangan dengan pandangan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' yang sesungguhnya inheren dalam nas (wahyu) bukan berdasarkan akal semata.

Dalam menentukan apakah nas terdapat kemaslahatan, ulama telah merumuskan cara yang bisa ditempuh, diantaranya ialah mencari *illat al-hukm*. Seperti *illat* dan kemaslahatan yang berada dibalik perintah dan larangan. Mengapa hal ini diperintahkan dan mengapa hal itu dilarang? Jika *illat* hukum suatu hal diketahui, maka harus diikuti. Selama ada alasan hukum suatu perintah atau larangan, maka tuntutan perintah atau larangan itu ada dan dikehendaki. Dengan demikian dapat dilakukan pengembangan hukum dengan berdasarkan *'illat* hukum itu. Misalnya, kawin dimaksudkan untuk kepentingan memperoleh ketu-

²⁷ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Vol. 2, (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997), 44-45.

²⁸ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

²⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104. Lihat juga Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 223.

³⁰ Satria Effendi M. Zein, "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, (Surakarta: FIAI UMS, 1991), 23-40.

runan, jual beli dimaksudkan untuk kepentingan pemanfaatan barang yang dibeli, dan hukum *had* dimaksudkan untuk membuat jera dan upaya prefentif. Berdasarkan *'illat* hukum tersebut maka dimungkinkan pengembangan hukum pada bidang-bidang tersebut. Selanjutnya jika *'illat* hukum itu tidak diketahui, maka harus bersikap *tawaqquf* atau tidak mengklaim bahwa maksudnya adalah demikian.³¹

Memang, ada pendapat yang mengemukakan jika antara nas dan kemaslahatan bertentangan maka yang didahulukan adalah kemaslahatan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Najmuddin al-Tufi dari golongan Hanbaliyah, dengan sangat ekstrim menyatakan, *maslahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri (*dalil mustaqil*) dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik *maslahah* itu mendapat dukungan dari syara' ataupun tidak. *Al-maslahah*, kehujjahannya tidak bergantung pada kesaksian atau konfirmasi nass, tetapi hanya bergantung pada akal semata.³² Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang betul ada kemaslahatan yang bertentangan dengan nas?. Perlu kajian lebih lanjut dan mendalam. Namun, selama ini belum pernah ditemukan kemaslahatan yang bertentangan dengan nas. Jadi, nampaknya pernyataan mantan Ketua Fatwa MUI, Ibrahim Hosen tersebut bersifat mengandaikan. Tidak terjadi dalam kenyataan. Dan rasa-sasanya dengan kapasitas keilmuan yang dimilinya, tidak mungkin tidak mengetahui bahwa tidak mungkin kemaslahatan bertentangan nas. Ini dilakukannya, agar dalam merumuskan kemaslahatan, seseorang tidak liar dan meninggalkan nas. Jadi, ini dalam rangka kehati-hatian saja.

d. Mempriorotaskan *nas qat'iy* (wahyu)

Pemikiran ini sudah maklum dalam ijtiyah ulama, bahwa dalam menjawab persoalan-persoalan harus mendaulkan *nas qat'iy* karena kehujjahannya bersifat mutlak. Umat Islam hanya melaksanakan *nas qat'iy* tersebut. Kedudukan *nas qat'iy* merupakan level tertinggi dalam metode ijtiyah ulama, karena *nas qat'iy* merupakan wayu suci, di mana redaksi dan maknanya kalam Allah Swt. Dalam prakteknya, MUI dengan pendekatan *nas qat'iy*, yaitu berpegang pada nas al-Qur'an dan hadis,

³¹ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 275-291.

³² Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*. Jakarta: Paramadina, 1995), 254.

sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas hukumnya (*al-Ahkam al-Qat'iyah*) disampaikan sebagaimana adanya terhadap masalah-masalah yang muncul.³³

Untuk menjaga agar *maqasid al-shari'ah* dapat terwujud dengan baik dan efektif, MUI menyusun pedoman atau semacam Standar Operasional Prosedur penetapan fatwa halal, sebagai berikut:³⁴

- a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - 1) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - 2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LPPOM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalal-annya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
- e. Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
- f. Dalam Sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
- g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan ke-

33 Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2003, 716.

34 Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), 20.

halalannya atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.

- h. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halal oleh Sidang Komisi.
- i. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-tanfiz-kan dan dikeluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Dari sini, nampak sekali bahwa upaya sertifikasi halal oleh MUI tidak main-main. Harus dilakukan audit secara berulang-ulang. Para auditor harus memahami betul bahan-bahan yang tidak halal, terus ke lapangan untuk melihat secara langsung bahan-bahan tersebut, kemudian melakukan uji laboratorium. Juga melihat dari dekat proses produksi. Dan jika, tahapan-tahapan tersebut dilalui dengan baik, maka dilaksanakan sidang komisi fatwa, baru setelah itu dikeluarkan sertifikat halal. Namun, jika tidak memenuhi standar halal yang telah ditetapkan, maka MUI tidak mengeluarkan sertifikat halal tersebut. Hanya saja, bagi yang tidak lolos uji halal, MUI memberi saran untuk mengganti bahan-bahannya dengan yang halal. Jadi, di sini MUI bukan sekedar mengaudit saja tetapi juga memberi kesempatan untuk kepada perusahaan untuk dilakukan sertifikasi ulang.

2. Sertifikasi Halal MUI terhadap Produk Sandang Perspektif Madh-hab Negara

Negara, dalam kajian-kajian hukum Islam sampai saat ini masih menjadi kajian yang menarik. Dan lebih menarik lagi adalah para ahli belum ada kata sepakat tentang sistem negara yang paling sesuai dengan syari'at. Hal ini wajar, karena memang Rasulullah Saw. tidak pernah mewariskan satu sistem pun dalam konteks kenegaraan. Andai Rasulullah Saw. mewariskan sebuah sistem kenegaraan (kepemimpinan) tentu para sahabat saat itu tidak berdebat siapa siapa yang akan memimpin setelah beliau. Pada kenyataannya, era Khulafa' al-Rashidun berbeda sistem pemilihan pemimpin.

Para ahli hanya bersepakat (*ijma'*), bahwa mendirikan negara itu wajib, karena dengan adanya negara maka ketertiban masyarakat dapat terwujud, kemaslahatan lebih bisa dijamin dan kemadaraman dapat di-

hindarkan.³⁵ Adapun soal sistem dan bentuk negara, masing-masing ahli mempunyai pandangan. Dan pandangan ini sampai saat ini tidak bisa disatukan. Contoh, para ahli berbeda ketika menanggapi sistem demokrasi sekarang ini. Satu pihak menyebut bahwa demokrasi adalah sistem yang Islami, karena sistem ini paling mendekati dengan makna *shura* (musyawarah) sebagaimana kata ini telah disebutkan dalam al-Qur'an. Sedangkan pihak lain, mengklaim bahwa demokrasi adalah produk kafir. Dan dalam prakteknya, demokrasi dan *shura* berbeda. Dalam demokrasi siapa saja bisa terlibat, baik itu orangnya berintegritas atau tidak, sedangkan dalam *shura* hanya orang-orang yang berintegritas saja yang biasa terlibat. Jadi kualifikasi tertentu yang harus dimiliki seseorang yang terlibat dalam majelis *shura*.

Demikian juga, ketika mendefinisikan tentang terminologi *dar Islam* (negara Islam) dan *dar al-kufr* (negara kafir). *Dar Islam* (negara Islam) sebagian memaknai sebagai sebagai sebuah negara, di mana pemimpin, peraturan perundang-undangannya menggunakan sistem Islam, walaupun warganya ada yang muslim dan non-muslim. Adapun, *dar al-kufr* (negara kafir) adalah negara dimana tidak ada kekuasaan Islam. Semua peraturan perundang-undangannya tidak menggunakan sistem Islam. Sedangkan sebagian lagi mendefinisikan *dar Islam* (negara Islam) adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya muslim, walaupun kekuasaan negara berada di tangan non-muslim. Juga, *dar al-Islam* bisa dimaknai sebagai negara atau pemerintahan di mana umat Islam merupakan minoritas, tetapi tetap diberi kebebasan untuk mengamalkan syiar Islam, sekalipun kekuasaan negara berada di tangan non-muslim. Adapun, *dar al-kufr* (negara kafir) adalah kekuasaan negara/pemerintahan, di mana tidak pada umat Islam, dan mereka tidak dilindungi hak-haknya, serta tidak diberi kebebasan untuk mengamalkan ajaran agamanya.³⁶

Dari dua kutub pemikiran tentang *dar al-Islam* tersebut, nampaknya para ahli hukum Islam di Indonesia kebanyakan berpihak pada definisi yang kedua, yaitu bahwa negara walaupun warganya minoritas Islam, tetapi diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya, maka negara tersebut termasuk negara Islam. Apalagi, di Indonesia merupakan

35 Ibrahim Hosen, "Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, Tahun 1994, 61-62.

36 Ibid., Lihat juga Azyumardi Azra, "Islam dan Negara : Eksperimen dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio Historis", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, Tahun 1994, 11.

an negara di mana warga negaranya mayoritas Islam, bahkan dalam sejarah Republik Indonesia, pemimpin Indonesia (Presiden) selalu berada di tangan orang Islam. Dengan kata lain, negara Indonesia, walaupun tidak secara formal menggunakan Islam sebagai sistem negara, namun dalam kenyataannya dasar negara dan konstitusinya satupun tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Fenomena seperti ini dalam terminologi modern disebut dengan negara simbiosis, yaitu memandang agama dan negara berhubungan secara simbiosis, yaitu hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini agama membutuhkan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang.

Melalui alur pemikiran ini, dapat dipahami jika kemudian produk perundang-undangan di Indonesia sangat kental dengan nuansa Islam. Ambil contoh, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diakui sebagai bagian dari sistem perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. KHI ini mengikat umat Islam Indonesia, jika terjadi sengketa masalah pernikahan, kewarisan, dan perwakafan. Kitab KHI menjadi kitab wajib yang menjadi pegangan bagi setiap hakim pengadilan agama dalam memutus perkara pernikahan, kewarisan, dan perwakafan. Demikian juga, pada tahun 2008 Mahkamah Agung melalui Peraturan MA RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan kewenangan kepada hakim pengadilan agama untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Jadi, negara Indonesia sesungguhnya, bisa dikatakan menganut faham negara simbiosis dan dalam praktek kenegaraan bisa disebut sebagai *dar al-Islam*.

Dalam konteks MUI, sesungguhnya tidak ada beda dengan hal tersebut di atas, bahwa berdirinya MUI tidak bisa dilepaskan dari campur tangan negara. Pada tahun 1975, sebuah panitia dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 28 tanggal 1 Juli 1975³⁷ untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21-27 Juli 1975 (12-18 Rajab 1395 H) di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini kemudian sepakat untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian diberi kewenangan untuk memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan keummatan.³⁸

Terlepas dari berbagai kritik yang ditujukan kepada MUI, tetapi harus diakui bahwa MUI merupakan satu-satunya lembaga yang punya

37 MUI, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995), 13.

38 MUI Sumut, *Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)*, Dewan Pin. *Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara*, (Medan: MUI Sumut, 2006), 1.

stempel dan secara resmi didirikan oleh pemerintah/negara yang sampai saat tetap menjadi rujukan utama umat Islam Indonesia, terutama terkait dengan masalah-masalah yang membutuhkan status hukum.

MUI, dengan lembaga di bawahnya, yaitu Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan banyak fatwa tentang masalah-masalah hukum yang menjadi persoalan umat Islam. Dan pemberian sertifikat halal menjadi salah satu kewenangan Komisi Fatwa yang saat ini menjadi rujukan, terutama perusahaan-perusahaan agar produknya diterima oleh masyarakat.

Dengan dibantu oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika, serta produk-produk sandang.³⁹

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Kewajiban pencatuman label halal ini dapat sangat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan manakala produk yang dimilikinya telah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI. Selain itu, bentuk logo halal yang khas dan seragam sangat membantu konsumen untuk mengingatnya, sehingga tidak membingungkan antara mana logo halal yang didukung oleh Sertifikat Halal dan mana yang tidak.

Adapun mengenai produk sandang, menurut Osmena Gunawan Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, bahwa setiap masyarakat memproduksi sesuatu dan kemudian dia ingin dinyatakan produknya halal, atau syar'i, MUI sah saja membolehkannya. Bahwa nanti digunakan untuk kerudung atau baju tergantung produsennya. Osmena melanjutkan, sertifikat yang diberikan MUI adalah pembuatan kainnya, bukan kerudung. Namun, dia berharap agar label halal tersebut tidak disalahgunakan.

39 LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), 9.

an dengan menyebut produk di luar Zoya adalah haram.⁴⁰

Memang, sampai saat ini usulan sertifikasi halal masih bersifat permohonan dari pihak yang ingin disertifikasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Kepala Bidang Informasi Halal LPPOM MUI Farid Mahmud bahwa belum ada kewajiban untuk setiap produsen memiliki sertifikat halal. Hingga saat ini permohonan tersebut masih dilakukan berdasarkan permintaan produsen terkait. Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan, semua produk sandang harus bersertifikasi halal karena dimungkinkan ada bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syariah seperti dari kulit babi. Keinginan MUI ini juga merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Dengan demikian, sebagaimana penuturan Ma'ruf Amin tersebut semata-mata untuk memberikan jaminan akan kehalalan produk sandang. Sertifikasi jenis ini penting karena pihaknya pernah menemukan bahan sepatu bukan berasal dari kulit sapi atau kambing, melainkan dari kulit babi. Lantaran berasal dari bahan yang haram, tetap saja sepatu itu tidak boleh dipakai. Produk lain seperti kayu olahan juga ada yang terbukti menggunakan bahan najis. Dia mencontohkan olahan kayu yang dihaluskan kemudian dipadatkan lagi menggunakan campuran bahan lain sebagai perekat. Ternyata perekat tersebut berasal dari bahan yang tidak bersih atau najis.⁴¹

Jadi, bisa dikatakan sertifikasi halal oleh MUI sesungguhnya untuk melindungi konsumen, terutama konsumen umat Islam. Konsumen umat Islam merupakan warga negara, salah satu haknya yang harus terpenuhi adalah jaminan keamanan untuk mengkonsumsi atau mendapatkan terhadap segala sesuatu yang halal, karena halal dalam Islam adalah urusan yang mutlak harus dijamin, sebab tidak hanya menyangkut urusan dunia tetapi juga urusan akhirat. Jaminan keamanan seperti ini adalah kewajiban negara terhadap warganya. Dalam negara dalam konteks ini telah melimpahkan kewenangan tersebut kepada MUI. Karena itu, umat Islam Indonesia harus mengikuti fatwa yang diputuskan oleh MUI.

40 <https://www.merdeka.com/gaya/zoya-klaime-produk-jilbabnya-halal-ini-kata-mui.html>, diakses 21 Agustus 2016.

41 <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=19&date=2016-03-26>, diakses 21 Agustus 2016.

F. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Sertifikasi halal pada produk sandang oleh MUI dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme baku yang telah diatur dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 20– 2 Syawal 1424 H/ 14–16 Desember 2003 M. Kemudian secara teknis melalui mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tertuang dalam mekanisme kerja Komisi Fatwa MUI No. U634/MUI/X/1997. Prosedur dan mekanisme mengatur secara detail urutan-urutan yang harus dilalui sebelum sertifikat halal dikeluarkan.
2. Dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*, MUI melaksanakan sertifikasi halal selalu memperhatikan *maqasid al-shari'ah*, yaitu maksud-maksud yang menjadi tujuan syara', yaitu pemeliharaan atas *daruriyyat al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sangat diperhatikan MUI tiap mengeluarkan fatwa. Artinya, tiap fatwa MUI diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan dimaksud, baik yang *ukhrawi* maupun *duniawi*. Dan dalam perspektif madhhab negara sertifikasi halal oleh MUI sesungguhnya untuk melindungi konsumen, terutama konsumen umat Islam. Konsumen umat Islam merupakan warga negara, salah satu haknya yang harus terpenuhi adalah jaminan keamanan untuk mengkonsumsi atau mendapatkan terhadap segala sesuatu yang halal, karena halal dalam Islam adalah urusan yang mutlak harus dijamin, sebab tidak hanya menyangkut urusan dunia tetapi juga urusan akhirat. Jaminan keamanan seperti ini adalah kewajiban negara terhadap warganya. Dalam negara dalam konteks ini telah melimpahkan kewenangan tersebut kepada MUI. Karena itu, umat Islam Indonesia harus mengikuti fatwa yang diputuskan oleh MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Azra, Azyumardi. "Islam dan Negara : Eksperimen dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio Historis", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uloomul Quran*, No. 2, Vol. IV, Tahun 1994.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 4-5.
- Farh, Amin. *Kemaslahahan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Ghazali (al), Abu Hamid Muhammad. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: al-Amiriyah, 1412 H.
- . *al-Mustashfa bi Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1995.
- Hosen, Ibrahim. "Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uloomul Quran*. No. 2, Vol. IV, Tahun 1994.
- . "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- . "Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uloomul Quran*. No. 2, Vol. IV, Tahun 1994.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2003.
- Keputusan Munas VII MUI Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.
- Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007), Cet. Ke-I, 217-221.
- LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Mas'udi, Masdar F. "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uloomul Qur'an*. No.3, Vol. VI Tahun 1995.
- Mattulada. "Studi Islam Kontemporer : Sintesis Pendekatan Sejarah, Sosiologi, dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Cet. 3. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- MUI Sumut. *Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)*, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Medan: MUI Sumut, 2006.

- MUI. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 1995.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, 1998.
- Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al Maqasid 'inda Shatibi*. Mesir: Dar al-Kalimah, 1997.
- Rakhmad, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.
- Rumadi. "Metode *Istinbath* Muhammadiyah, NU dan MUI", http://www.wahid.institute.org/v1/Programs/Detail/?id=285/hl=id/Metode_Istinbath_Muhammadiyah_NU_Dan_MUI, diakses 22 Agustus 2016.
- Shatibi (al), Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- _____. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Vol. 2. Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Shatibi (al), Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II. Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Sjadzali, Munawir. "Reaktualisasi Ajaran Islam", *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zein, Satria Effendi M. "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS, 1991.
- <http://berita.suaramerdeka.com/mui-keluarkan-sertifikasi-halal-pakaian/>, diakses 29 Maret 2016.
- <http://ekbis.sindonews.com/read/1096148/34/sertifikasi-halal-produk-sandang-pengusaha-kecil-di-daerah-teriak-1459085508>, diakses 29 Maret 2016.
- <http://ekbis.sindonews.com/read/1096148/34/sertifikasi-halal-produk-sandang-pengusaha-kecil-di-daerah-teriak-1459085508>, diakses 29 Maret 2016.
- http://news.okezone.com/read/2016/03/25/337/1345524/mui-sepatu-dan-baju-harus-punya-sertifikasi-halal?utm_source=daihatsu, diakses 29 Maret 2016.
- <http://news.okezone.com/read/2016/03/26/337/1345994/pbnu-mui-tak-perlu-keluarkan-sertifikasi-halal-untuk-baju>, diakses 29 Maret 2016.
- <http://www.aktualita.co/ini-penjelasan-mui-soal-sertifikasi-halal-pada-jilbab/8434/>, diakses 19 Februari 2016.
- <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=19&date=2016-03-26>, diakses 21 Agustus 2016.
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/20/mzpc59-nu-tolak-monopoli-sertifikasi-halal>, diakses 29 Maret 2016.
- <https://www.merdeka.com/gaya/zoya-klaim-produk-jilbabnya-halal-ini-kata-mui.html>, diakses 21 Agustus 2016.